

Analisis Kritis: Impelentasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Pendidikan Anak Usia Dini

Wulan Tini

Institut Agama Islam Persis Bandung

*email: wulantini@iaipibandung.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) at the Early Childhood Education (PAUD) level within the Independent Curriculum was originally designed to foster children's character through a liberating approach. However, in practice, this paradigm shift has created epistemological and methodological conflicts for teachers in the field. This study aims to conduct a critical analysis of the implementation of P5 at the PAUD level, with a specific focus on pedagogical readiness, structural workload, and teachers' stuttering in translating the abstract values of Pancasila into child-friendly stimulation. Using a qualitative approach with critical case studies, data were collected from several PAUD units through in-depth interviews with teachers, participatory observation of the project process, and critical analysis of teaching module documents compiled independently by teachers. The results reveal the phenomenon of "curriculum formalism," where teachers are trapped in administrative performativity and product orientation (output) for the sake of documentation fulfillment, rather than prioritizing child agency and process-oriented reflection. The imbalance in Pedagogical Content Knowledge (PCK) tends to lead teachers to adopt a rigid (teacher-centered) instructional role, reducing the meaning of P5 to merely a seasonal craft activity. This research shows that early childhood education (PAUD) teachers experience dual pressures between structural administrative burdens and the idealistic demands of the new curriculum without adequate conceptual guidance. The implications of this research urge the need for a deconstructive reconstruction of teacher training patterns and a reorientation of P5 policies to return to the fundamental principles of early childhood play.

Keywords: Independent Curriculum, PAUD Teachers, Pedagogical Content Knowledge (PCK), P5 PAUD.

ABSTRAK

Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada jenjang PAUD dalam Kurikulum Merdeka sejatinya dirancang untuk menumbuhkan karakter anak melalui pendekatan yang memerdekakan. Namun, pada praktiknya perubahan paradigma ini menimbulkan benturan epistemologis dan metodologis bagi guru di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap implementasi P5 pada jenjang PAUD, dengan fokus spesifik pada kesiapan pedagogis, beban kerja struktural, dan kegagapan guru dalam menerjemahkan nilai abstrak Pancasila ke dalam stimulasi ramah anak. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus kritis, data dikumpulkan dari beberapa satuan PAUD melalui wawancara mendalam terhadap guru, observasi partisipatif proses proyek dan analisis kritis terhadap dokumen modul ajar yang disusun mandiri oleh guru. Hasil penelitian mengungkap adanya fenomena "formalisme kurikulum", di mana guru terjebak pada performativitas administratif dan orientasi produk akhir (output) demi pemenuhan dokumentasi, daripada mengutamakan agensi anak dan refleksi proses (process-oriented). Ketimpangan Pedagogical Content Knowledge (PCK) membuat guru cenderung mengambil peran instruksional yang kaku (teacher-centered), yang mereduksi makna P5 menjadi sekadar kegiatan prakarya musiman. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru PAUD mengalami tekanan ganda antara beban administratif struktural dan tuntutan idealisme kurikulum baru tanpa pendampingan konseptual yang memadai. Implikasi penelitian ini mendesak perlunya rekonstruksi pola pelatihan guru yang dekonstruktif dan reorientasi kebijakan P5 agar kembali pada khittah kodrat bermain anak usia dini.

Kata Kunci: Guru PAUD, Kurikulum Merdeka, Pedagogical Content Knowledge (PCK), P5 PAUD.

PENDAHULUAN

Transpormasi kurikulum di Indonesia melalui implementasi kurikulum merdeka membawa paradigma baru yang menempatkan penguatan karakter sebagai pilar utama dan dimanifestasikan melalui proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD). P5 dirancang untuk menumbuhkan nilai luhur pancasila sejak dini melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual, eksploratif dan berpusat pada anak. Esensi P5 pada fase fondasi ini sejatinya adalah memperkuat filosofi “merdeka belajar” dan “merdeka bermain”, dimana proses internalisasi nilai karakter terjadi secara alami melalui interaksi, pemecahan masalah sederhana dan pengalaman langsung yang menyenangkan tanpa adanya paksaan akademis yang menyulitkan bagi anak.

Pandangan tataran empiris, guru PAUD sebagai ujung tombak kurikulum menghadapi benturan epistemologis dan metodologis yang hebat. Guru dituntut menjadi fasilitator yang memerdekakan agensi anak, namun di sisi lain, mayoritas guru masih terbelenggu oleh paradigma lama yang bersifat instruksional dan berpusat pada guru (teacher-centered). Kegagalan ini diperparah oleh rendahnya pedagogical content knowledge (PCK) guru dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila yang abstrak ke dalam stimulasi konkret yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Alih-alih merancang proyek yang berbasis pada minat dan suara anak (child's voice and choice), guru cenderung mengambil jalan pintas dengan mendikte seluruh jalannya aktivitas demi mengejar output visual, seperti kemegahan pameran "Panen Hasil Belajar". P5 akhirnya mengalami reduksi makna di tangan guru, dari yang seharusnya menjadi proses internalisasi karakter, bergeser menjadi sekadar pemenuhan beban administratif dan teknis pembuatan prakarya yang melelahkan.

Lebih jauh lagi jika dianalisa dan ditelaah, masih terdapat banyak ketimpangan konseptual mengenai bagaimana dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila yang bersifat abstrak harus diterjemahkan ke dalam indikator perkembangan anak usia dini yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Tanpa adanya dekonstruksi dan analisis kritis terhadap praktik yang sedang berjalan, P5 di tingkat PAUD berisiko mengalami reduksi makna yang hanya menjadi suplemen kegiatan keahlian tangan (prakarya) atau kegiatan musiman yang kehilangan substansi pedagogisnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yang tidak sekadar mengevaluasi ketercapaian administratif, melainkan melakukan analisis kritis terhadap dinamika kuasa, kesiapan epistemologis guru, serta kesesuaian perkembangan (developmentally appropriate practice) dalam implementasi P5 di lapangan.

Kondisi ini menempatkan guru PAUD dalam posisi yang rentan secara profesional. Di satu sisi, mereka harus menuruti tuntutan performativitas kebijakan yang menuntut dokumentasi serba ideal, namun di sisi lain, mereka kekurangan ruang refleksi dan pendampingan substantif untuk memahami esensi dari proyek itu sendiri. Analisis kritis terhadap posisi guru menjadi sangat krusial, karena ketidakpahamannya berisiko menciptakan "kurikulum tersembunyi" (hidden curriculum) yang destruktif, di mana anak-anak dipaksa menyelesaikan target produk orang dewasa di bawah tekanan instruksi guru. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna membongkar secara kritis hambatan struktural, beban psikologis, serta dinamika adaptasi guru PAUD dalam menegosiasikan idealisme Kurikulum Merdeka di tengah keterbatasan kapasitas konseptual mereka. Penelitian mengenai P5 secara umum telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terbatas pada studi evaluatif kuantitatif atau deskriptif normatif mengenai efektivitas implementasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengambil posisi teoritis yang kritis untuk membongkar hegemoni kebijakan, kendala struktural, serta bias pemahaman guru dalam menerjemahkan P5 pada konteks pendidikan anak usia dini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dekonstruktif bagi para pengambil kebijakan, pengawas, dan praktisi PAUD dalam mereorientasi P5 agar kembali pada khittah pembentukan karakter anak yang berbasis pada kodrat bermain.

METODE

Berdasarkan fokus penelitian yang mengkritisi posisi guru (kegagapan pedagogis, beban administratif, dan performativitas), metode penelitian yang paling presisi adalah Pendekatan Kualitatif Deskriptif Kritis dengan Desain Studi Kasus (Critical Case Study). Desain ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam "kasus" kegagapan pedagogis guru di beberapa satuan PAUD. Pemilihan responden pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu beberapa guru kelas yang merancang dan mengeksekusi modul P5 (diutamakan yang mengalami

transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka). Dan sebagai responden pendukung kepala sekolah dilibatkan dalam wawancara sebagai pembuat kebijakan di tingkat satuan) dan pengawas/penilik PAUD untuk melihat tekanan eksternal birokrasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik wawancara secara mendalam untuk membedah realitas guru secara kritis yang memerlukan teknik interaktif dan non-interaktif, observasi partisipatif pasif untuk mengamati langsung interaksi guru dan anak saat P5 berlangsung dan analisis dokumen untuk membedah modul proyek P5 yang dibuat guru, RPP/Modul Ajar, dan foto/video dokumentasi "Panen Hasil Belajar". Analisis data yang peneliti gunakan dalam metode studi kasus ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan/verifikasi).

Validitas data dalam penelitian ini diuji melalui uji kredibilitas dengan menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui pencocokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, member check dilakukan dengan meminta informan meninjau kembali hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi yang dimaksud oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi kasus kritis pada beberapa satuan PAUD, ditemukan adanya jurang pemisah yang lebar antara esensi filosofis P5 yang dicanangkan pemerintah dengan realitas implementasi oleh guru di kelas. Temuan penelitian dikelompokkan ke dalam tiga tema kritis berikut:

1. Kerapuhan Kesiapan Pedagogis: Keterbatasan *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) Guru

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi P5 di tingkat PAUD telah mengalami komodifikasi dan formalisme kurikulum. Guru-guru terjebak dalam pusaran performativitas, di mana indikator keberhasilan P5 diukur dari kemegahan "Perayaan Panen Hasil Belajar" dan kelengkapan dokumentasi digital untuk diunggah ke Platform Merdeka Mengajar (PMM) atau instrumen akreditasi. Akibatnya, fokus guru teralih dari proses stimulasi karakter anak menjadi manajemen acara (*event organizing*) dan pemenuhan target produk akhir (*output-oriented*) tanpa memperhatikan dengan pembelajaran bermakna bagi anak.

Hal ini terungkap secara gamblang melalui pengakuan salah satu informan, Ibu G1 (Guru Kelas TK B):

"Jujur saja, kami stres kalau sudah masuk bulan proyek. Kepala sekolah dan pengawas menuntut pamerannya harus meriah karena mau difoto untuk laporan ke dinas dan di-share ke medsos sekolah. Akhirnya, kami (guru) yang pontang-panting bikin dekorasi dan menyelesaikan kerajinan tangan anak-anak biar kelihatan bagus dan layak pajang. Kami tahu ini salah, tapi kalau tidak begitu, sekolah kami dianggap tidak berhasil menerapkan Kurikulum Merdeka."

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pandangan tersebut sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Stephen Ball sebagai "budaya performativitas" (*culture of performativity*), di mana kedirian profesional guru diukur berdasarkan indikator kinerja yang tampak dari luar (*performance*). Pada konteks ini, P5 tidak lagi berfungsi sebagai media dekonstruksi karakter Pancasila yang natural bagi anak, melainkan berubah menjadi "panggung sandiwara birokrasi". Guru mengalami alienasi profesional; mereka tahu bahwa esensi P5 adalah proses bermain yang merdeka, namun tekanan struktural memaksa mereka mengeksploitasi tenaga dan waktu demi menghasilkan produk visual yang diakui oleh sistem pengawasan makro.

Temuan pertama ini mengungkap bahwa ketidakpakaian guru dalam mengimplementasikan P5 berakar dari lemahnya *Pedagogical Content Knowledge* (PCK), yaitu kemampuan khusus untuk meramu konten kurikulum ke dalam strategi pembelajaran yang ramah anak. Kurikulum Merdeka menuntut guru bertindak sebagai arsitek kurikulum yang mandiri (membuat modul proyek sendiri). Namun, karena tidak dibekali dengan pelatihan yang emansipatif,

guru mengalami disorientasi pedagogis dan terjebak pada metode instruksional yang kaku (*teacher-centered*). Ibu guru kelas A ibu MR menyampiakan bahwa,

"Kami dilepas begitu saja dengan instruksi 'Silakan merdeka mengajar, buat proyek sesuai kreativitas'. Tapi kami tidak pernah diajari bagaimana caranya mengobservasi minat anak untuk dijadikan proyek. Karena bingung dan takut salah, saya memilih menyalin (copy-paste) modul P5 yang ada di internet. Di kelas, saya yang mendikte semua jalannya kegiatan: 'Hari ini kita menempel ini, besok mewarnai itu'. Anak-anak tidak punya pilihan. P5 yang katanya merdeka, di kelas kami malah jadi sangat mengikat karena gurunya sendiri tidak tahu cara membebaskan anak."

Pemaparan di atas didukung oleh pandangan Lee Shulman (1987) yang menyatakan bahwa tanpa PCK yang kokoh, guru akan cenderung kembali ke metode mengajar konvensional yang bersifat represif-instruksional saat menghadapi kurikulum baru. "Kemerdekaan" yang ditawarkan oleh kebijakan makro justru berubah menjadi deprofesionalisasi guru di tingkat mikro (Priestley et al., 2015). Senada dengan pandangan di atas, pandangan Henry Giroux (2020) menegaskan mengenai pedagogi kritis, guru PAUD telah diturunkan statusnya dari seorang "intelektual transformatif" menjadi sekadar "teknisi kurikulum" (*clerical technicians*). Guru akan kehilangan agensi profesionalnya untuk merancang pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pada suara anak (*child's voice*), karena mereka sendiri terikat oleh ketidakpahaman konseptual terhadap esensi pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*).

2. Kegagalan Epistemologis: Menerjemahkan Nilai Abstrak Pancasila ke dalam Stimulasi Ramah Anak (*Child-Friendly*)

Temuan kedua menyoroti adanya kegagalan konseptual dan metodologis guru. Banyak guru PAUD yang tidak memiliki latar belakang pemahaman yang kuat tentang bagaimana menerjemahkan dimensi Profil Pelajar Pancasila yang abstrak (seperti "berkebinekaan global" atau "bernalar kritis") ke dalam capaian perkembangan anak usia dini yang masih berada pada tahap berpikir pra-operasional (konkret). Kegagalan ini melahirkan praktik duplikasi regulasi (*copy-paste*) modul proyek tanpa adanya kontekstualisasi yang relevan. Sebagaimana dipaparkan oleh Ibu G2 (Guru Kelas TK A):

"Kami bingung menterjemahkan tema 'Gaya Hidup Berkelanjutan' atau 'Kearifan Lokal' untuk anak umur 4 tahun. Pelatihan dari dinas hanya satu kali dan isinya teori semua. Akhirnya, biar aman dan cepat, saya download saja modul proyek yang ada di internet atau PMM, lalu saya ikuti mentah-mentah di kelas. Anak-anak disuruh mewarnai gambar baju adat atau membuat pot dari botol bekas. Apakah karakternya muncul? Saya sendiri tidak yakin, yang penting modulnya terlaksana."

Ketimpangan *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) ini membuktikan bahwa desentralisasi kurikulum melalui "Merdeka Belajar" justru memicu deprofesionalisasi guru ketika tidak dibarengi dengan skema pendampingan yang emansipatif. Guru dipaksa menjadi arsitek kurikulum mandiri (membuat modul proyek), namun tanpa bekal kapasitas epistemologis yang memadai. Menurut perspektif pedagogi kritis Paulo Freire, praktik mengunduh modul secara mentah-mentah dan menerapkannya secara mekanis adalah bentuk "*banking concept of education*" (pendidikan gaya bank). Bedanya, kali ini guru yang "mengisi" pikiran mereka sendiri dengan dokumen dari platform digital, kemudian mentransfer instruksi kaku tersebut kepada anak didik, sehingga mengeliminasi hak eksplorasi anak secara alamiah.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, pandangan lain menunjukkan bahwa data lapangan menunjukkan adanya jarak yang lebar antara konsep filosofis Pancasila yang bersifat makro-abstrak dengan kemampuan kognitif anak usia dini yang berada pada fase pra-operasional (berpikir konkret). Guru mengalami "kegagalan epistemologis" dalam membumikan dimensi P5 (seperti berkebinekaan global atau bernalar kritis) menjadi aktivitas bermain yang bermakna. Akibatnya, guru mengambil jalan pintas dengan mereduksi nilai-nilai tersebut menjadi aktivitas simbolik-

motorik kasar yang superfisial (prakarya musiman). Hal ini tercermin dari penuturan Ibu A.S. (Guru Kelas TK B):

"Kami di PAUD itu gagap waktu membaca panduan P5. Di sana tertulis anak harus distimulasi untuk 'Bernalar Kritis' dan 'Berkebinekaan Global'. Bagaimana menjelaskan konsep 'Global' atau 'Negara' kepada anak umur 5 tahun yang egosentris? Pelatihan yang kami terima dari Dinas hanya menyuruh kami membuat proyek. Akhirnya, biar gampang dan kelihatan ada hasilnya, kami suruh saja anak-anak mewarnai gambar baju adat atau mencetak bentuk Garuda dari tanah liat. Kami tahu anak-anak tidak paham maknanya, mereka hanya menganggap itu pelajaran prakarya biasa."

Kegagapan ini membuktikan adanya pelanggaran terhadap prinsip *Developmentally Appropriate Practice* (DAP) yang dirumuskan oleh *National Association for the Education of Young Children* (NAEYC, 2020). Anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung yang sensoris dan kontekstual (*real-world experience*). Ketika guru memaksakan tema-tema abstrak tanpa rekonstruksi pedagogis yang matang, yang terjadi adalah reduksi esensi karakter. Jika ditelaah lebih jauh, hal di atas bersebrangan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, jika memaksakan konsep abstrak pada anak yang belum siap secara mental maka akan memicu verbalisme, dimana anak mampu mengucapkan kata-kata seperti "gotong royong" atau "pancasila", namun kehilangan kedalaman maknanya dalam perilaku sehari-hari (Wood & Attfield, 2005). Nilai Pancasila akhirnya dijinakkan menjadi sekadar hafalan dan rutinitas mekanis tanpa anak mampu memproses maknanya sesuai dengan tingkatan usianya.

3. Beban Kerja Struktural: Tekanan Rezim Performativitas dan Birokratisasi Kurikulum

Temuan ketiga mengidentifikasi bahwa relasi kuasa di dalam kelas saat pelaksanaan P5 masih didominasi oleh kendali penuh guru (*teacher-centered*). Demi mengejar efisiensi waktu dan estetika produk akhir proyek (agar disukai orang tua saat pameran), guru kerap kali mengambil alih pekerjaan anak atau mendikte setiap jengkal aktivitas anak. Ruang bagi anak untuk menyuarakan ide (*child's voice*) dan mengambil pilihan (*child's choice*) menjadi sangat terbatas.

Ibu G3 menyampaikan bahwa,

"Kadang kalau anak-anak dibebaskan membuat proyeknya sendiri, hasilnya acak-acakan dan tidak rapi. Nanti orang tua protes waktu pameran, mengira gurunya tidak mengajar. Jadi, waktu proyek membuat ecoprint atau menanam tanaman kemarin, pola dan langkah-langkahnya harus persis dari saya. Anak-anak tinggal nempel atau masukan tanah sesuai komando. Memang jadi kurang mandiri, tapi itu satu-satunya cara supaya target pameran tercapai tepat waktu."

Pemaparan ini menunjukkan terjadinya "kurikulum tersembunyi" (*hidden curriculum*) yang paradoks. Di atas kertas, P5 bertujuan menumbuhkan kemandirian dan gotong royong (agensi anak), namun di ruang kelas, tindakan guru justru mengonstruksi kepatuhan buta (*blind obedience*). Anak-anak direduksi posisinya sebagai objek pelaksana keinginan orang dewasa (guru dan tuntutan kepuasan orang tua). Analisis kritis melihat bahwa ketakutan guru akan penilaian eksternal (penilaian sosial dari orang tua dan penilaian formal dari dinas) telah memaksa mereka merampas hakikat bermain bebas pada anak usia dini. Pada P5 yang seharusnya menjadi ruang pembebasan karakter, justru berisiko menjadi instrumen baru penyeragaman perilaku anak di bawah kendali instruksional guru.

Pada temuan ketiga ini mengidentifikasi bahwa hambatan terbesar guru bukan berasal dari dalam kelas, melainkan dari tekanan struktural birokrasi. Guru mengalami kelelahan fisik dan psikologis (*burnout*) akibat tuntutan performativitas administrative, seperti keharusan mengunggah bukti karya ke Platform Merdeka Mengajar (PMM), menyusun laporan asesmen P5 yang rumit, hingga menyiapkan pameran "Panen Hasil Belajar" yang megah demi gengsi kelembagaan dan penilaian akreditasi, sehingga guru tidak menikmati kegiatan yang bermakna dan menyenangkan dengan anak didiknya, melainkan guru masih memikirkan mana yang bagus, harus bagaimana,

belum mengerjakan dokumen ini, dan lain sebagainya. Pemaparan ini dipertegas oleh Ibu NK selaku kepala sekolah salah satu PAUD mengungkapkan bahwa,

"Waktu guru habis bukan untuk nemenin anak main, tapi untuk memegang laptop. Kami harus bikin Modul Proyek lembar demi lembar, ngisi penilaian rubrik P5 yang ribet banget, belum lagi tuntutan pameran akhir semester. Kalau pamerannya biasa saja, kami ditegur pengawas, dianggap tidak melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan baik. Akhirnya, demi pameran terlihat sukses dan rapi di mata orang tua dan dinas, kami terpaksa mengambil alih pekerjaan anak-anak. Hasil karya anak yang acak-acakan kami perbaiki sendiri malam-malam di sekolah agar besok layak dipajang. Ini melelahkan dan penuh kepalsuan."

Fenomena ini merupakan representasi nyata dari apa yang disebut oleh Stephen Ball (2003) sebagai "teror performativitas" (*the terrors of performativity*). Dalam sistem ini, akuntabilitas moral pendidik telah digeser oleh akuntabilitas teatrikal-birokratis. Keberhasilan penanaman karakter Pancasila direduksi secara ekstrem menjadi komoditas visual yang bisa dinilai melalui foto, video, dan dokumen administratif (*fabrication*). Pandangan ini dipertegas oleh Andy Hargreaves (2003) yang menyatakan bahwa tekanan administratif yang masif seperti ini melahirkan gejala *contrived collegiality* (kolegialitas yang dipaksakan) dan *burnout* yang mengikis empati serta energi emosional guru. Guru PAUD yang seharusnya berfungsi sebagai figur lekat (*attachment figure*) yang memberikan rasa aman bagi anak usia dini, justru berubah peran menjadi *event organizer* (EO) pameran sekolah. P5, yang di atas kertas bertujuan melahirkan kemerdekaan, dalam realitas struktur birokrasi justru menjelma menjadi instrumen baru penjinakan dan eksploitasi terhadap waktu serta otonomi guru.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Creagh et al. (2023) yang menjelaskan bahwa intensifikasi beban kerja administratif menyebabkan guru mengalami time poverty, meningkatnya tekanan kerja, dan berkurangnya waktu untuk aktivitas pedagogis yang bermakna. Selain itu, Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia, Haeri dan Afriansyah (2023) melalui surveynya menemukan bahwa 79,1% guru menyatakan PMM meningkatkan beban administrasi, sementara 51% guru harus menyelesaikan tugas-tugas PMM di luar jam kerja, bahkan pada malam hari. Selain itu, 70,1% guru menggunakan PMM karena adanya instruksi langsung dari pemerintah atau sekolah, yang menunjukkan bahwa penggunaan platform lebih didorong oleh tekanan struktural daripada kebutuhan pedagogis guru. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi administrasi pendidikan belum sepenuhnya membebaskan guru, tetapi justru berpotensi memperkuat budaya performativitas dan akuntabilitas yang menggeser fokus guru dari interaksi pembelajaran yang bermakna menuju pemenuhan tuntutan administrative. Selaras dengan itu, Hermawan dan Wirza (2023) melaporkan bahwa guru masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemanfaatan PMM, terutama terkait tuntutan implementasi Kurikulum Merdeka, penguasaan platform digital, dan penyesuaian terhadap berbagai kewajiban baru yang menambah beban profesional mereka.

SIMPULAN

Secara kritis, hambatan utama implementasi P5 PAUD bukan terletak pada keengganan guru untuk berubah, melainkan pada tekanan struktural birokrasi dan kekosongan ruang refleksi metodologis. Guru PAUD terjebak menjadi buruh kurikulum yang sibuk memproduksi artefak pameran dan laporan digital, sementara esensi penanaman nilai Pancasila yang bermakna dan ramah anak justru terabaikan.

Ketiga aspek di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi. Beban kerja struktural yang tinggi merampas waktu refleksi guru, ketiadaan waktu refleksi ini memperparah kerapuhan kesiapan pedagogis (PCK) para guru dan ketidakpahaman pedagogis ini bermuara pada kegagalan epistemologis dalam menerjemahkan nilai Pancasila di kelas. Hal tersebut berdampak pada kehilangan hakikat "Merdeka Bermain" karena proses belajar mereka disubordinasikan demi pemenuhan target administratif dan performatif orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, 18(2), 215-228.
- Creagh, S., Thompson, G., Mockler, N., Stacey, M., & Hogan, A. (2023). Workload, work intensification and time poverty for teachers and school leaders: A systematic research synthesis. *Educational Review*. <https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2196607>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Giroux, H. A. (2020). *On Critical Pedagogy*. Bloomsbury Publishing.
- Haeri, I. Z., & Afriansyah, A. (2023). Eksplorasi beban digital guru: Survei pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh guru. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(2).
- Hargreaves, A. (2003). *Teaching in the Knowledge Society: Education in the age of insecurity*. Teachers College Press.
- Hermawan, H. A., & Wirza, Y. (2023). Exploring EFL teachers' knowledge on the utilization of Platform Merdeka Mengajar (PMM): Challenges, possibilities and practices. *ETERNAL (English Teaching Journal)*. <https://doi.org/10.26877/eternal.v16i2.1570>
- NAEYC. (2020). *Developmentally Appropriate Practice (DAP) Position Statement*. Washington, DC: NAEYC.
- Priestley, M., Biesta, G., & Robinson, S. (2015). *Teacher agency: An ecological approach*. Bloomsbury Publishing.
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-23.
- Sujiono, Y. N. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Wood, E., & Attfield, J. (2005). *Play, Learning and the Early Childhood Curriculum*. Sage Publications.